

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA
INSTANSI PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)



Oleh :
M. WIVANDI SAPUTRA
NIM. 88926/2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

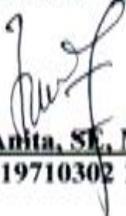
**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP
KINERJA INSTANSI PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Oleh :
M. WIVANDI SAPUTRA
NIM. 88926/2007

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... September 2014

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA
INSTANSI PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

M. Wivandi Saputra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : mwivandisaputra@yahoo.com

Key words: pengawasan internal, pengawasan eksternal, terhadap kinerja instansi pada pemerintah Kota Padang.

Abstrak

This study aims determine : 1. The effect of Internal Control on Performance of Padang's Government Agencies 2. The effect of External Control on Performance of Padang's Government Agencies

Type of the study is causative. Data collection using questionnaire survey instruments with Cluster random technique as sampling collection technique. The Samples in this study is chiefs of Padang's Government Agencies. Analytical Technique used in this study is multiple regression and t-test to determine the effect partially. The result of this study indicates : 1. Internal Control has positive significant effect on Performance of Padang's Government Agencies (H_1 accepted) with $t_{count} > t_{Table}$ which $5,096 > 1,998$ (sig $0,000 < 0,05$)
2. External Control has positive significant effect on Performance of Padang's Government Agencies (H_2 accepted) with $t_{count} > t_{Table}$ which yaitu $2,077 > 1,998$ (sig $0,040 < 0,05$).

This study suggested that : 1) The government officials should continue to improve the monitoring of the performance, so that irregularities and fraud can be avoided. 2) Clarity of rules and supervision by authorized parties should be clarified in order to reduce cases of irregularities both in quality and quantity of work in achieving goals. 3) continuous monitoring in order to achieve the objectives, goals and targets, the organization of work, thus giving impetus to improve its performance. 4) The results of monitoring and evaluation is expected to be a guide, in order to find out the weaknesses that happen to improvements for future periods.

1. PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah banyak menjadi sorotan pada akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas akan kualitas jasa maupun barang yang diberikan pemerintahan daerah.

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Organisasi tersebut efektif apabila suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi bisa berdiri diawali adanya beberapa tujuan yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama.

Menurut Indra (2006) kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi, agar terciptanya kinerja yang efisien dan efektif, diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan usaha untuk memonitor sejauhmana kegiatan-kegiatan administratif telah tercapai dan sekaligus mengetahui seberapa kemampuan dan keterampilan personil dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana dan hasil yang dikehendaki, dan segala sesuatunya telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002: 121). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena

pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Kinerja jika dilihat dari bahasa latinnya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Kinerja diartikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Pabundu (2006: 121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Bila dirinci lebih jauh maka sebagaimana disepakati dalam seminar Undang-undang Perbendaharaan Negara, tanggal 30 Agustus 1970, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam organisasi sektor publik, pengawasan keuangan negara bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Pengklasifikasian pengawasan menurut lingkupnya dapat dikelompokkan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Baswir, 1999: 124). Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal departemen atau lembaga negara yang

diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah dan lembaga eksekutif (Baswir, 1999: 124). Dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksanaan fungsi ini adalah: inspektorat jendral (Irjen), Inspektorat Wilayah Propinsi (twilprop), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakab) dan Inspektorat Wilayah Daerah dan Kota Madya (Itwildako). Menurut Sentanoe Kertonegoro (2001:95) menyatakan hubungan pengawasan internal terhadap kinerja adalah sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan untuk tujuan perencanaan, menyusun informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan serta mengukur pertimpangan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif (Baswir, 1999: 125). Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

Kasus di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru menimbulkan kinerja para pegawai semakin rendah. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPRD (Mardiasmo, 2002: 216).

Fenomena yang terjadi sampai saat ini di Kota Padang adalah Pemerintah Kota Padang sampai saat ini masih belum bisa juga memaksimalkan APBD, yang mana di dalamnya termasuk pula pengelolaan PAD, sebagai pendapatan utama daerah. Daya serap dana APBD pada 10 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tahun 2010 masih lemah

(Safasindo.com, 25/04/2012). Alasan pemerintah adalah karena ada beberapa kegiatan yang dihentikan sehingga dana yang tak terserap di SKPD cukup besar. Selain itu, dari hasil penelusuran, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 792,96 milyar rupiah menjadi 887,38 milyar rupiah. Pendapatan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2011 masih didominasi dari Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 624,6 milyar rupiah atau sebesar 67,72 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 128,46 milyar rupiah atau 13,92 persen, sedangkan untuk Belanja Pembangunan, selama tahun 2011 dialokasikan sebesar 1,01 triliun rupiah sedangkan realisasinya hanya sebesar 881,72 milyar rupiah atau 87,24 persen. Realisasi terbesar adalah untuk sektor otonomi daerah dan Administrasi Keuangan yaitu sebesar 134,79 milyar rupiah atau mencapai 58,83 persen (Situs Resmi Pemerintah Kota Padang, 25/04/2012). Dari 100 persen total realisasi yang diharapkan, hanya 87,24 persen yang akhirnya terealisasi dengan baik. Sedangkan sisa 12,76 persen tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang.
2. Pengaruh pengawasan eksternal terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang.

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan internal dan pengawasan eksternal dalam Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang.
2. Bagi Pemerintah Kota, penelitian ini akan dapat menjadi masukan dalam pengukuran kinerja Instansi pemerintah kota khususnya hubungan pengawasan internal dan pengawasan eksternal dengan Pemerintah Kota Padang.

3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dalam pengawasan kinerja Instansi pemerintah Kota Padang.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002: 121). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Kinerja jika dilihat dari bahasa latinnya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Untuk lebih mendalami apa yang dimaksud dengan kinerja, berikut peneliti kutip beberapa pendapat ahli.

Menurut Pabundu (2006: 121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi.

Menurut Prawiro Suntoro (1999) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002: 121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor

publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006: 74). Untuk dapat memenuhi tuntutan akan akuntabilitas publik diperlukan adanya paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah (1) APBD harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik; (2) APBD merupakan dana publik yang penggunaannya harus berorientasi pada kinerja yang baik (ekonomis, efisien dan efektif); (3) penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan APBD (Mardiasmo, 2006: 28).

Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran, karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Aspek yang harus tercakup dalam proses penganggaran dan menjadi fungsi pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik adalah perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja. Pusat pertanggungjawaban menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja karena pusat pertanggungjawaban menjadi basis dalam mengukur kinerja.

Kinerja (prestasi) manajer publik dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006: 74). Pengungkapan kinerja Pemerintah Daerah secara tepat dan obyektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi semacam ini pada tahap selanjutnya akan menimbulkan perbaikan atau peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengungkapan kinerja akan mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan

masyarakat dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006: 274).

a. Indikator

Peraturan Pemerintah No 10, tahun 1979 tentang P3 PNS, menyatakan ada 8 indikator dalam kinerja instansi pemerintah yaitu:

1) Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, criteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan criteria efisiensi yang sangat relevan.

2) Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan public tersebut tercapai. hal tersebut kaitannya dengan nilai, misionis, tujuan organisasi.

3) Keadilan

kriteria ini berkaitan konsep ketercukupan atau kepastian. isu –isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya.

4) Produktivitas

produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

5) Kualitas pelayanan

isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

b. Pengawasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengendalian keuangan daerah, diperlukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian kewenangan dan keleluasaan di daerah harus diikuti pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) dan didukung partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep Pengawasan

Menurut Basri (2003: 6) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengawasan menurut Bohari (1995: 4) pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Tujuan Pengawasan

Pengawas dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986: 136) dalam Shinta (2000), tujuan pengawasan:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- 4) Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Selanjutnya, menurut Wursanto (1986: 158) dalam Shinta (2000) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- 1) Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan.
- 2) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul.
- 3) Mencegah penyimpangan.
- 4) Mendidik untuk mempertebal rasa tanggung jawab.
- 5) Memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan yang timbul.
- 6) Mendapat efisiensi dan efektifitas.

Sifat Pengawasan

Sifat-sifat pengawasan dikemukakan Siagian dalam Kamar (2004: 86) dalam Salman (2001), meliputi:

- 1) Mencari fakta tentang tugas yang dilaksanakan dan aspek psikologis seperti rasa hormat, dihargai, dan kemajuan dalam karir.
- 2) Preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan.
- 3) Diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- 4) Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi.
- 5) Mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikerjakan.
- 6) Tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- 7) Bahkan mencari atau menentukan siapa yang salah tetapi menemukan apa yang tidak benar.
- 8) Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugasnya.

Prinsip Pengawasan

Menurut Kamar (2004: 84) dalam Salman (2001) mengatakan prinsip pengawasan antara lain:

- 1) Pengawasan hendaknya dimulai sejak rencana disusun yang menyangkut efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan penggunaan sumber daya.
- 2) Temuan pengawasan harus ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 3) Pengawasan hendaklah orang yang mempunyai kemampuan teknis, kesungguhan kerja dan kepribadian terpuji.

- 4) Pengawasan hendaklah dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun, tidak boros, tepat waktu dan mengenai objek yang tepat.

Proses Pengawasan

Menurut Handoko (1995: 363) proses pengawasan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengawasan meliputi:

- 1) Penetapan standar.
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- 3) Mengukur pelaksanaan kegiatan (evaluasi).
- 4) Perbandingan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan.
- 5) Pengambilan tindakan koreksi

Teknik dan Metode Pengawasan

Perbedaan antara pelaksanaan dengan rencana selalu ada karena keterbatasan kemampuan para penyelenggara kegiatan operasional dan penampilan perilaku penyelenggara yang disfungsi dapat diketahui dengan berbagai teknik. Menurut Kamar (2004: 87) dalam Salman (2001), metode dan teknik pengawasan antara lain:

- 1) Observasi langsung.

Metode ini dilakukan dengan melihat, mendengar dan mengalami hal-hal yang diawasi.

- 2) Metode statistik

Metode ini dilakukan jika banyak terdapat segi teknis yang terjadi.

- 3) Metode secara lisan dan tulisan

Menurut Handoko (1995:376) metode pengawasan ada 2 macam:

- a) Metode non kuantitatif.

Metode kuantitatif yaitu metode pengawasan keseluruhan (*overall*) terhadap kinerja (*performance*) organisasi dan sebagian biasanya mengawasi sikap dan kinerja (*performance*) para karyawan.

- b) Metode kuantitatif

Metode ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya organisasi.

Indikator Keberhasilan Pengawasan

Pengawasan melekat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan

dan pembangunan secara baik. Keberhasilan waskat ini pada akhirnya akan menyebabkan waskat itu sendiri tumbuh menjadi perilaku yang melekat dalam tata kerja pemerintahan, dan berkembang menjadi budaya atau kultur baru aparatur pemerintahan.

Revrisond (1999: 135) mengemukakan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Indikator ini dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya tingkat kehadiran.
 - b) Berkurangnya tunggakan kerja
 - c) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas, dan dapat diukur serta terlihat adanya kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - d) Tugas dapat selesai sesuai rencana, baik dari aspek fisik maupun rencana.
 - e) Tercapainya sasaran tugas seperti delapan sukses pembangunan di daerah.
 - f) Berkurangnya kerja lembur.
 - g) Meningkatnya disiplin aparatur.
- 2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
 - b) Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sebagai misal, gaji pegawai negeri diterima oleh yang bersangkutan secara tepat waktu dan jumlah,
- 3) Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar. Indikator ini dapat dilihat antara lain:
 - a) Berkurangnya kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran dan pemborosan sebagaimana terbaca dalam laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
 - b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4) Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Hilangnya antrian yang penuh sesak diloket pelayanan.
- b) Ketepatan waktu dalam perizinan pelayanan.
- c) Berkurangnya tunggakan kerja.
- d) Makin baiknya prestasi pelayanan, yang ditandai oleh berkurangnya pengaduan masyarakat

Pengawasan Internal

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disepakati dalam seminar *Indische Compslashhilitiitwet* (ICW), 30 Agustus 1970. dalam Halim (2002: 146).

Menurut Baswir (1998: 124) pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Pengawasan internal inipun dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal Departemen atau lembaga Negara yang diawasi. Pengawasan internal dalam arti sempit ini, baik aparat pengawas maupun pihak yang diawasi, sama-sama bernaung dibawah naungan Menteri atau Ketua Lembaga Negara yang sama. Dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksanaan fungsi ini adalah: inspektorat jendral (Irjen), Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakab) dan Inspektorat Wilayah Daerah dan Kota Madya (Itwildako).

Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif.

Manfaat Pengawasan Internal

Pengawasan Intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

Komponen Pengawasan Internal

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pengawasan intern terdiri dari lima komponen saling berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. Komponen merupakan perwujudan suatu iklim manajemen di mana sejumlah orang melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan filosofi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan wewenang/ tanggungjawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak.

2) Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)

Setiap Entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola. Penaksiran resiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3) Aktivitas Pengawasan (*Control Activities*)

Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta pemisahan tugas.

4) Informasi Dan Konomikasi (*Information And Communication*)

Informasi yang relevan perlu diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja Sistem Pengendalian Manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan (audit) intern atau melalui kedua-duanya.

Komponen tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang lain. Dalam lingkungan pengendalian, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan diperbaiki bilamana perlu.

Pengawasan Eksternal

Menurut Baswir (1998: 125) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang juga termasuk kedalam kategori pengawasan eksternal adalah pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat atau dikenal sebagai pengawasan masyarakat. Dilihat dari sudut

pengertian pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemerintah atau aparatur-aparaturannya, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengawasan masyarakat ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelembagaan.

Menurut Halim (2004: 309) pengawasan ekstern adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi tidak ada mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Menurut Halim (2004: 309) bentuk pengawasan yang termasuk kedalam pengawasan ekstern adalah adanya pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa pikiran, saran, gagasan atau keluhan serta pengaduan yang bersifat membangun disampaikan secara langsung maupun melalui media massa.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. www.google.com/Tempo. Asep Rusli. 08 Juni 2009. 10.00 WIB

Hasil Penelitian yang Relevan

Hendra (2011) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengawasan Internal dan Esksternal terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Kabupaten Tanah Datar). Dari penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengawasan Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja

Aparatur Pemerintah Daerah. 2) Pengawasan Esksternal berpengaruh signifikan Positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Andhika (2010) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan kinerja pemerintah daerah. Dari penelitian dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan antara Pengawasan Internal dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Andhika (2010), menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95%, Pengawasan Internal (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah (Y), yang menyatakan bahwa Pengawasan Internal adalah sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan, serta mengukur pertimpangan dan melakukan tindakan yang di perlukan untuk menjamin semua sumber di pergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan pengawasan internal terhadap kinerja instansi adalah dengan adanya pengawasan yang dilakukan lembaga yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri, untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas. Dalam hal ini pengawasan internal harus di lakukan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik – baiknya dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari rencana yang telah ditetapkan tersebut, berjalannya kegiatan organisasi haruslah adanya pengawasan. Pengawasan internal ini dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal Departemen atau lembaga yang diawasi dan aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus

pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah dan lembaga eksekutif. Pengawasan internal ini dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisiatif organisasi, menghindari biaya-biaya tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai menurut rencana. Bohari (1995: 4) menyatakan bahwa pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Revrisond (1999:118) mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi pengawasan Internal merupakan suatu tindakan yang menjadi alat dalam pencapaian kinerja, apabila pengawasan internal telah tercapai sesuai yang diharapkan maka akan mendukung tercapainya kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan.

b. Hubungan antara Pengawasan Eksternal dengan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Menurut Baswir (1998: 125) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

Setelah dilakukannya pengawasan internal oleh aparat pengawas berwenang maka untuk mendukung keberhasilannya itu diperlukan pengawasan eksternal sebagai unsur penunjang, agar pengawasan eksternal dapat berfungsi secara efektif. Fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang juga termasuk kedalam kategori pengawasan eksternal adalah pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat atau dikenal sebagai pengawasan masyarakat. Dilihat dari sudut pengertian pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemerintah atau aparatur-aparaturinya, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Pengawasan masyarakat ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelembagaan. Begitu juga dengan BPK dan DPR merupakan pihak yang independen untuk tidak memihak dan menilai secara objektif aktivitas organisasi pemerintah yang diawasi. Hasil penilaian BPK dipakai sebagai bahan penilaian kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya BPK memiliki tolak ukur yang tepat dalam menilai pihak yang diawasinya. Begitu juga dengan DPR, aparat pengawas ini melakukan penilaian tidak hanya pada tahap pelaporan saja tetapi dimulai dari tahap perencanaan.

Apabila pengawasan eksternal telah tercapai dan berfungsi secara efektif, maka hal ini akan mendukung terciptanya kinerja instansi pemerintah yang sebagai mana mestinya. Jadi didalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, pengawasan eksternal merupakan suatu sarana yang penting untuk menunjang tercapainya kinerja instansi pemerintah tersebut.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen, Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal sebagai variabel independen.

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja atau prestasi kerja aparatur pemerintah

daerah suatu organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja (prestasi) dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil dicapai. Pengungkapan kinerja Pemerintah Daerah secara tepat dan obyektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi semacam ini pada tahap selanjutnya akan menimbulkan perbaikan atau peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengungkapan kinerja akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002: 121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yaitu dengan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Sedangkan pengawasan eksternal juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan yang diselenggarakan oleh pihak luar organisasi pemerintah itu sendiri yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kedinasan, akan lebih tegas dengan wewenang dalam mengawasi

prestasi atau kinerja pemerintah dalam pencapaian tujuannya.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa, dengan adanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal akan lebih sempurna, karena sering kali bawahan lebih mengerti kondisi yang ada di lapangan sehingga pengawasan akan dapat memperbaiki proses pengendalian menyeluruh, selain itu dengan adanya pengawasan dapat membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan berbagai pengertian pengawasan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pengawasan Internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang.

H₂: Pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 1999: 37). Dalam hal ini menjelaskan dan melihat seberapa jauh pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kinerja Instansi pemerintah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kota Padang yaitu terdapat 45 SKPD.

Penelitian ini menggunakan metode *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 subjek. Responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD, dan seluruh Kepala bagian SKPD di Kota Padang, adapun SKPD di Kota Padang adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1Daftar Nama SKPD Pemerintah kota

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan penyebaran secara langsung yang diantarkan langsung kepada responden yang bersangkutan. Untuk pengumpulan kuesioner juga dilakukan secara langsung, yaitu dengan menjemput langsung pada responden.

Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup kepada aparat pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Kota Padang Kuesioner diberikan secara langsung kepada aparat pemerintah daerah. Pengembalian kuesioner dijemput langsung sesuai kesepakatan pengembalian

Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi atau menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi

variabel dependen nantinya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan Internal dan pengawasan Eksternal.

Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert, yang mengukur sikap dengan menyatakan selalu atau tidak pernah terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (KS=Kurang Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kuisisioner dengan pengukuran skala likert. Kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid). Sebelum dibagikan ke kuisisioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan. Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 koesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah lulus mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Akuntansi 2. Untuk uji validitas ini digunakan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 15.0.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan *reliable* (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika r Alpha negatif dan kecil dari r tabel, berarti tidak reliabel, sedangkan bila r Alpha positif dan besar dari r tabel berarti keseluruhan butir tersebut reliabel. Sekaran (2002) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- 0,6 – 0,7 akseptabel

- c. 0,7 -0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 0,6 keatas untuk mengukur reliabilitasnya. Jadi semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir pertanyaan dalam koefisien semakin reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogonov-smirnov test* dengan melihat tingkat signifikansi lima persen. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat *probability asymp.sig (2-tailed)*. Jika *probability asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari pada 0,05 maka data mempunyai distribusi yang normal.

2) Uji Multikolinearitas.

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) kecil dari 10 dan *tolerance* besar dari 0,10.

3) Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah metode regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini, apabila hasilnya sig besar dari pada 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Metode Analisis

a) Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square-nya*, koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikatnya. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan banyaknya variabel X yang ada pada model.

b) Persamaan Data Regresi

Metode analisis yang dipakai adalah metode regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = kinerja Instansi pemerintah
- A = Konstanta
- $b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen
- X_1 = Pengawasan internal
- X_2 = Pengawasan eksternal
- e = Epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

Untuk pengujian data digunakan:

c) Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

Uji Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap

konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,005$ (5%).

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika tingkat signifikan $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1, 2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1, H_2 .
- Jika tingkat signifikan $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- Jika tingkat signifikan $> \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

Definisi operasional.

Untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh aparatur pemerintah daerah atau suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja Instansi pemerintah dalam penelitian ini dapat dilihat dari pencapaian program-program berdasarkan target dan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.

Pengawasan Internal ini dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengawasan internal dalam arti sempit yaitu pengawasan yang dilakukan aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal Departemen atau lembaga Negara yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara oleh pemerintah.

3. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh suatu pengawas yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi. Jadi dalam pengawasan eksternal ini, tidak terdapat hubungan kedinasan antara pengawas dengan yang diawasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, dan inspektorat daerah. Sampel pada penelitian ini yaitu Kepala (SKPD), dan seluruh Kepala bagian SKPD di lingkungan Pemko Padang, sehingga jumlah responden adalah 198 responden.

Dari kuesioner yang di bagikan, ada 5 SKPD yang menolak diberikan kuesioner, sehingga kuesioner yang disebar kepada 40 SKPD atau 160 responden, SKPD yang menolak diberikan kuesioner yaitu: 1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. 2) Rumah sakit umum daerah. 3) Dinas kesehatan. 4) kecamatan Koto Tangah. 5) Dinas Pendidikan. Dinas-dinas ini menolak diberikan kuesioner alasan karena kesibukan dalam hal pekerjaan. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 140 responden, namun kuesioner yang dapat di olah hanya 120 responden, 20 responden tidak menjawab pertanyaan kuesioner secara lengkap.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 72$, adalah 0,1954. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1, X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan

bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan *semakin* baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis pertanyaan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 15.0 Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan nilai *Kolmogoro-Smirnov Test* untuk model yang diperoleh, dapat di lihat pada Tabel 12. Terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,952 dengan signifikan 0,326. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1 . Variabel pengawasan internal

(X_1) dengan nilai VIF 1,013 dan variabel pengawasan eksternal (X_2) dengan nilai VIF 1,013 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* $> 0,1$ pada variabel pengawasan internal (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,987 dan variabel pengawasan eksternal (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,987. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel *independent* pada penelitian ini bebas multikol

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Gletser*. Dalam uji ini, didapat yaitu 0,169 untuk variabel X_1 , dan 0,720 untuk variabel X_2 . Apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

Analisis Data

1. Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,208. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap variabel terikat yaitu kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 20,8%, sedangkan 79,2% ditentukan oleh faktor lain.

2. Persamaan Regresi

Dari hasil pengolahan data SPSS, dapat dilihat pada Tabel 17 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 19,511 + 0,468 \text{ PI} + 0,206 \text{ PE} + e$$

Keterangan:

Y : kinerja Instansi Pemerintah

X_1 : Pengawasan Internal

X_2 : Pengawasan Eksternal

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 19,511 yang berarti bahwa tanpa adanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal, tingkat kinerja instansi pemerintah kota Padang

berada pada 19,511 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 adalah sebesar 0,468 ini berarti bahwa meningkatnya pengawasan internal satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,468 satuan dan bentuk pengaruhnya X_1 terhadap Y adalah positif. Nilai koefisien X_2 adalah sebesar 0,206 ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengawasan eksternal SKPD kota Padang satu satuan maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 0,206 satuan dan bentuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah positif. Koefisien pengawasan internal dan pengawasan eksternal menggambarkan hubungan dengan kinerja instansi pemerintah berbanding lurus.

3. Uji F (F-test)

Hasil pengolahan data SPSS pada uji F untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat serta untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ($\alpha=0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat di handalkan. Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

4. Uji Hipotesis

Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh yang dapat dilihat pada Tabel 16, maka uji hipotesis pertama dan kedua dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Hipotesis pertama yang diajukan, bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi pemerintah. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,998. Nilai t_{hitung} untuk variabel pengawasan internal (X_1) adalah 5,096 signifikan pada level 0,000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,096 > 1,998$ (sig 0,000<0,05). Nilai koefisien positif β adalah 0,468, Hal

ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

- b) Hipotesis kedua yang diajukan, bahwa pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,998. Nilai t_{hitung} untuk variabel pengawasan eksternal (X_2) adalah 2,077 signifikan pada level 0,040. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,077 > 1,998$ (sig 0,040<0,05). Nilai koefisien positif β adalah 0,206, Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Semakin meningkat pelaksanaan pengawasan internal maka kinerja instansi pemerintah juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah mempunyai hubungan positif, semakin meningkat pelaksanaan pengawasan internal maka kinerja instansi pemerintah juga meningkat. Hasil ini sejalan dengan teori Halim (2004: 308) yang mengemukakan bahwa pengawasan internal merupakan alat yang paling efektif yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisiatif organisasi, menghindari biaya-biaya tidak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya Baswir (1999: 118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan internal merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk tercapainya kinerja instansi pemerintah yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan internal dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja instansi pemerintah Kota Padang akan lebih terarah dalam pencapaian sasarannya. Selain itu penyimpangan dan penyelewengan juga akan terminimalisir karena satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2004: 308) Pengawasan Intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Irwan (2009) pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, dan mengemukakan bahwa Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pengawasan Eksternal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Bahwa pengawasan eksternal dan kinerja instansi pemerintah mempunyai hubungan positif, semakin terlaksana pengawasan eksternal maka kinerja instansi pemerintah juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan eksternal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hasil ini sejalan dengan teori Baswir (1998: 125) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bahwa Masyarakat dapat menyampaikan gagasan secara lisan ataupun tertulis kepada instansi pemerintah yang berkepentingan untuk lebih meningkatkan kinerja instansi tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Padang
2. Pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Padang

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terbatas pada Dinas dan Badan pemerintah Kota Padang hanya meneliti pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Masih ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal, sehingga penyimpangan dan penyelewengan dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara aparat pemerintah, sehingga tiap hambatan dapat diantisipasi pemecahannya. Sehingga kinerja yang diharapkan bisa tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya.

2. Kejelasan aturan dan pelaksanaan pengawasan oleh pihak yang mempunyai wewenang harus diperjelas agar mengurangi kasus penyimpangan baik secara kualitas, maupun kuantitas dalam pencapaian tujuan kerja.
3. Pemantauan secara terus menerus oleh atasan agar dapat mencapai tujuan, sasaran dan target kerja organisasi, sehingga memberikan dorongan tersendiri terhadap pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
4. Hasil pengawasan dari pihak internal maupun pihak eksternal diharapkan menjadi panduan dan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi guna perbaikan untuk periode yang akan datang.
5. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh variabel-variabel lain berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Andhika, (2010). *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Universitas Pasundan*: (Skripsi)
- Bambang Yudoyono. (2003). *Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bohari, KJ, H. U. 1992. "Tauchen dan A.D. Witte *the Effect Of Audits dan Socioeconomic Variables On Compliance*". dalam J. Slemrod (ed), *Why People Pay Taxes*, univercity Of Michigan press, Ann Arbor: 67-89. Evidence On Tax Compliance, *American Economic Review*. Vol 77, p 240-245.
- Cavendro Hendra (2011). "*Pengaruh Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar*": Universitas Negeri Padang. (Skripsi)
- Handoko, T. Hani. (1998). *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Husein Umar. 1999. *Metode Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- _____. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ERLANGGA
- Kabid. Was. Kinerja Bawasda Kabupaten Sleman. "*Sleman Pos*" (3 Juli 2009) melalui www.goolge.com
- Manulang, (2008). *Manajemen Personalia*, Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press.
- Pabundu, (2006). *Budaya Organisasi Untuk Peningkatan Kinerja*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Revrisond Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- safasindo.com." *Situs resmi Pemerintah Kota Padang*." 25 April 2012.
- Sarwoto, (1996). *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Siswanto, (2007). *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, (2004). *Kiat-kiat dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara.

Thomas Porter, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

www.goolge.com/Tempo. Asep Rusli. Hal 4. 08 Juni 2009. 10.00 WIB

Winardi, (2002). *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan*, Jakarta: ISBN.

Yuswar Zainul Basri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama Responden : _____ (Boleh tidak di isi)
- b. Umur :tahun
- c. Jenis kelamin : laki-laki perempuan
- d. Pendidikan terakhir : SMA D3
 S1 S2
- e. Nama Pemerintahan :
- f. Masa kerja :tahun
- g. Jabatan : Kadis Kabag
 Kasubag Kabid
 Kasi
- h. Golongan : III IV

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kinerja Instansi Pemerintah

Penulis mengharapkan Bapak dan Ibu berkenan menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu bekerja, dengan memberi tanda ceklis (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 R : Ragu-Ragu
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku dan perbuatan para aparatur pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan.					
2	Pada Instansi ini, selalu mengutamakan Pelayanan terhadap masyarakat.					
3	Adanya penilaian kemampuan karyawan dalam kinerja Instansi ini					
4	Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya sesuai dengan target kerja yang telah ditentukan.					
5	Pada instansi ini, kegiatan yang dianggarkan tidak sepenuhnya terlaksanakan.					
6	Selau mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan.					
7	Mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya.					
8	Melaporkan setiap hasil kerja kepada atasan menurut keadaan yang sebenarnya.					
9	Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.					
10	Pada instansi ini mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum.					

11	Bertindak tegas dan tidak memihak dalam suatu keadaan pada suatu masalah yang dihadapi.					
12	Mampu menentukan prioritas dengan tepat dan mengambil keputusan dengan cepat dan sesuai dengan sasaran.					
13	Adanya tukar menukar informasi dengan instansi lain dalam peningkatan kinerja					

2. Pengawasan Internal

Penulis mengharapkan Bapak dan Ibu berkenan menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu bekerja, dengan memberi tanda ceklis (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- R : Ragu-Ragu
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Pengawasan Internal dimulai dengan melihat tingkat kehadiran kerja yang memadai					
2	Pengawasan Internal dapat mengantisipasi atau mengurangi tunggakan kerja					
3	Dengan adanya pengawasan internal, setiap rencana yang disusun dan menggambarkan adanya sasaran yang jelas dapat direalisasikan dalam aktifitas kerja pegawai					
4	Pengawasan Internal menunjang setiap pengerjaan tugas dan selesai sesuai rencana, baik aspek fisik maupun rencana					
5	Dengan adanya Pengawasan Internal disiplin aparatur pemerintah dapat ditingkatkan					
6	Penyalahgunaan wewenang oleh aparatur dapat dicegah dengan adanya pengawasan internal					
7	Terpenuhinya hak-hak pegawai. Misal, penerimaan gaji secara tepat waktu dan jumlah					
8	Pengawasan Internal dapat mengurangi kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpanan, penyelewengan tugas					
9	Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan					
10	Keberadaan pengawasan Internal dapat mempecepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan					
11	Pengawasan Internal mengidentifikasi bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan dan memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam					

3. Pengawasan Eksternal

Penulis mengharapkan Bapak dan Ibu berkenan menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu bekerja, dengan memberi tanda ceklis (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- SS : Sangat Setuju

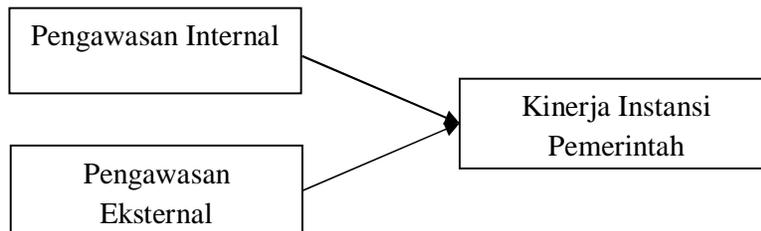
- S : Setuju
 R : Ragu-Ragu
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Pengawasan Eksternal dapat mengurangi tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan					
2	Hasil pemeriksaan BPK sebagai pengawas eksternal selalu dipakai sebagai bahan penilaian kinerja					
3	BPK melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah melalui pemeriksaan laporan keuangan secara objektif dan independen					
4	BPK memiliki tolak ukur yang tepat dalam menilai pihak yang diawasinya					
5	Masyarakat dapat menyampaikan gagasan secara lisan ataupun tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur tersebut					
6	Aparat pengawasan eksternal menyampaikan hasil pengawasannya secara tepat waktu					
7	Aparat pengawas eksternal tidak menggunakan wewenang untuk menekan serta mengambil keuntungan dari pihak yang diawasi (aparatur pemerintah) yang melakukan pelanggaran					
8	Pengawasan oleh DPRD tidak hanya dari tahap pelaporan saja, tetapi dimulai dari tahap perencanaan					

Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner

LAMPIRAN

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Hasil Uji Analisis

A. Teknik Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

b)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.38467996
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.038
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.952
Asymp. Sig. (2-tailed)		.326

a. Test distribution is Normal.

c) Uji Multikolinearitas

d)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.987	1.013
	X2	.987	1.013

a. Dependent Variable: Y

e) Uji Heterokedastisitas

f)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.545	2.599		3.288	.001
	X1	-.077	.055	-.128	-1.383	.169
	X2	-.022	.060	-.033	-.359	.720

a. Dependent Variable: AbsUt

2. Uji Model

a) Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1374.934	2	687.467	16.581	.000 ^a
	Residual	4850.932	117	41.461		
	Total	6225.867	119			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

b) Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	.221	.208	6.439

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

c) Analisis Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.511	4.306		4.531	.000
	X1	.468	.092	.419	5.096	.000
	X2	.206	.099	.171	2.077	.040

a. Dependent Variable: Y